

Penelitian dan Kemampuan Ilmu-ilmu Sosial : Pelajaran dari Seminar Orientasi Sosial Budaya *

Oleh Ignas Kleden

Antara penelitian sosial, pengembangan serta peningkatan kemampuan ilmu-ilmu sosial terhadap hubungan timbal balik. Hasil suatu penelitian sosial diandaikan akan menyumbang peningkatan kemampuan ilmu sosial. Sebaliknya, berhasil atau tidaknya, sangat tergantung dari kemampuan yang ada. Hubungan mana yang lebih kuat dan menentukan, hanya dapat dilihat kasus per kasus. Menyoroti hasil penelitian orientasi sosial budaya yang diselenggarakan LIPI, Ignas Kleden berusaha menunjukkan bagaimana kedudukan penelitian sosial, dan ada tidaknya peranannya terhadap peningkatan kemampuan ilmu-ilmu sosial di Indonesia.



I

Sekurang-kurangnya bisa disebut dua anggapan tentang hubungan antara penelitian yang menyangkut masalah-masalah sosial dan budaya dengan kemampuan ilmu-ilmu sosial yang diterapkan dan digunakan dalam penelitian itu. Dalam anggapan pertama, penelitian semacam itu diandaikan akan memberi sumbangan melalui temuan, kesimpulan, hipotesa, konsep dan bahkan teori baru, yang akan tambah meningkatkan kemampuan ilmu-ilmu sosial. Penelitian di sini dilihat sebagai *input* penting untuk kemajuan ilmu-ilmu sosial dan merupakan

syarat yang harus dijalankan, supaya perkembangan ilmu-ilmu sosial dimungkinkan.

Namun demikian sebuah penelitian sosial hanya mungkin dilakukan dengan mempergunakan berbagai peralatan yang disiapkan oleh ilmu-ilmu sosial, yaitu perangkat instrumentarium yang meliputi metode dan teknik penelitian di satu pihak serta teori yang memungkinkan konseptualisasi di pihak lainnya. Dengan demikian hasil penelitian dan mutu penelitian, yang sebagian besar ditentukan oleh pemilihan metode yang sesuai serta penggunaan konsep serta teori yang *resourceful*, akan mencerminkan pula kemampuan seorang peneliti dalam hal penguasaan dan penggunaan instrumentarium yang tepat, kemampuan suatu komunitas ilmuwan sosial di mana peneliti tersebut diperanggotakan, serta taraf kemajuan ilmu-ilmu sosial yang sudah tercapai dalam komunitas tersebut. Ini berarti, suatu penelitian sosial adalah juga *output* dari ilmu-ilmu sosial yang ada, yang mencerminkan kapasitas yang sudah dikembangkan sampai pada suatu saat tertentu.

Orang bisa berkata bahwa kedua anggapan diatas akan berlaku pada penelitian-penelitian yang bersifat dasar (yang memang bertujuan meningkatkan kapasitas dan taraf

* Seminar tentang hasil penelitian tahap III ini diadakan di Banjarmasin, 28 November - 1 Desember 1983, dalam kerjasama antara LIPI dan IAIN Antasari, Banjarmasin. Hasil-hasil penelitian di sembilan daerah penelitian yang dibahas dalam seminar ini adalah tentang: - Bahasa, kesenian dan permainan sebagai ungkapan simbolik aspirasi masyarakat dan sebagai wahana enkulturasi. - Makna agama. - Makna hidup dan fungsi kerja. Dalam tulisan ini masalah bahasa, kesenian dan permainan tidak ditinjau, karena dalam seminar tidak disertakan makalah tentang penelitian lapangan yang dapat dijadikan bahan bangunan. Dengan demikian tinjauan ini akan membatasi diri pada hasil penelitian tentang makna agama, makna hidup dan fungsi kerja.

pencapaian ilmu-ilmu sosial) tetapi tidak dapat diberlakukan begitu saja terhadap penelitian terapan atau penelitian yang bersifat *policy-* dan *action oriented* (karena pada yang terakhir ini tujuan utamanya bukanlah pada peningkatan taraf pencapaian ilmu-ilmu sosial, tetapi pada pemanfaatan dan pendaya-gunaan hasil-hasil penelitian). Keberatan semacam ini sebetulnya sulit diterima. Sebabnya ialah karena ada suatu korelasi lurus antara pertanggungjawaban metodologis-ilmiah suatu penelitian dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian tersebut untuk tujuan penerapan atau penggunaannya secara praktis. Berarti semakin suatu hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis ilmiah (yang berarti semakin banyak dia menjelaskan gejala sosial yang ditelitinya, dan semakin sedikit melakukan distorsi terhadap gejala sosial yang hendak dijelaskannya), akan semakin bermanfaat pula dia apabila hasil-hasilnya itu digunakan untuk menyusun suatu kebijaksanaan atau digunakan sebagai pegangan untuk suatu *problem solving*.

Dengan demikian perbedaan antara penelitian dasar dan penelitian terapan bukanlah terletak pada ketat-longgarnya prosedur ilmiah yang ditempuhnya, melainkan pada sifat sasarannya. Penelitian dasar mempunyai sasaran ke dalam: meningkatkan dan memperkembangkan kemampuan ilmu-ilmu sosial (baik dengan cara menambah perbendaharaan baru pada *body of knowledge* yang sudah ada, maupun dengan semakin mempertajam *tool of analysis* yang digunakannya). Penelitian terapan mempunyai sasaran keluar: bagaimana hasil-hasil yang dicapainya bisa turut membantu siapa saja yang berkepentingan dalam berhadapan dengan suatu masalah sosial, baik itu masalah yang muncul dari struktur sosial, maupun yang diakibatkan oleh perubahan sosial.

Inilah pertimbangannya bahwa dalam menyoroiti hasil-hasil yang tercapai dalam penelitian orientasi sosial budaya tahap III ini tidak akan dianut pandangan bahwa dari penelitian dasar dan penelitian terapan dituntut tanggung jawab yang berbeda mengenai keketatan prosedur ilmiahnya.

Ada suatu alasan tambahan mengapa penelitian seperti ini patut diperiksa secara metodologis dan diberi kritik seperlunya.

Mungkin sudah banyak diketahui bahwa penelitian ini merupakan bagian dari proyek *Studi Strategi Kebudayaan*, yang dalam jangka panjangnya bertujuan "memandu atau memberikan pedoman kepada segenap-usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dari generasi ke generasi" serta "menjamin berlangsungnya pembangunan nasional sebagai suatu proses budaya menuju perwujudan yang makin lengkap serta makin sempurna dari pandangan hidup Pancasila dalam masyarakat Indonesia."¹ Jelaslah bahwa hasil-hasil penelitian ini akan dijadikan landasan untuk suatu kebijaksanaan nasional yang menyangkut kepentingan yang sangat luas. Karena itu adalah wajar dan perlu diadakan suatu tinjauan kritis untuk memperkirakan kekuatan landasan itu sendiri.

Dari namanya, penelitian ini sudah menunjuk dirinya sebagai suatu penelitian yang bersifat *policy oriented*. Namun demikian, karena di sini dianut pandangan bahwa baik penelitian dasar maupun penelitian terapan sama-sama harus tunduk kepada prosedur dan syarat-syarat ilmiah yang sama, maka yang ingin dilihat dalam tinjauan ini adalah dua hal berikut. *Pertama*, seberapa jauh hasil yang dicapainya menambah perbendaharaan dan kejemihan pengertian kita tentang tipe-tipe orientasi sosial-budaya yang ada dalam berbagai kelompok etnis dan komunitas antar-etnis. *Kedua*, seberapa jauh hasil-hasil yang dicapainya memperlihatkan kemampuan dan juga ketidak-mampuan instrumentarium ilmu-ilmu sosial yang digunakan dalam penelitian ini, dan mungkin juga sedikit mencerminkan kemampuan ilmu-ilmu sosial yang hidup di pusat-pusat pengembangannya.

Di samping itu, setiap pembicaraan dan diskusi terbuka tentang penelitian dan hasil-hasilnya (yang nota bene sangat jarang dilakukan!) akan membantu mengontrol mutu penelitian sosial yang begitu banyak diadakan. Memperbanyak penelitian, tanpa mengimbangnya dengan penerapan asas komunalitas ilmiah yang memadai, mengandung risiko proliferasi kegiatan yang tak

1 Mochtar Buchori & EKM Masinambow, *Rancangan Dasar untuk Suatu Penelitian Lapangan*, LIPI, 1981, hal. 1.

disertai oleh pengawasan kualitas penelitian.²

II

Bagi sebagian pembaca mungkin masih perlu dijelaskan bahwa seminar orientasi sosial budaya adalah seminar tentang hasil-hasil penelitian lapangan, yang sekarang sudah memasuki tahap ketiga, dan merupakan lanjutan dari seminar-seminar dengan sifat dan topik yang sama yang diadakan sebelumnya.³ Dengan demikian dapatlah diandaikan bahwa pada dasarnya penelitian-penelitian ini masih mengikuti rencana penelitian yang sama, yang berarti tetap mempertahankan tujuan penelitian yang sama, menganut kerangka konseptual yang sama, menggunakan metode yang sama, dan tidak melampaui lingkup dan batas sifat eksploratoris penelitian yang sama pula.

Menarik bahwa sekali pun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui "proses penerusan nilai-nilai antargenerasi dan implikasi edukatifnya, terutama kemampuan pedagogis orangtua terhadap anak-anaknya"⁴, na-

2 Menurut penelitian Robert K. Merton maka perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian subur dalam masyarakat puritan di Inggris abad 17, sebetulnya dilandasi oleh suatu etos ilmu pengetahuan yang mempunyai empat unsur pokok: — *universalism*, yaitu keyakinan bahwa gejala alam di mana-mana mempunyai suatu uniformitas, sehingga kebenaran pernyataan tentang gejala-gejala itu akan berlaku di mana saja, tanpa tergantung kepada siapa yang menyatakannya. (Dewasa ini asumsi ini mendapat perlawanan sengit dari aliran kritis dari Sekolah Frankfurt). — *disinterestedness*, yaitu keyakinan bahwa pengetahuan yang benar tidak akan tercapai dengan sikap manipulatif, yang dikendalikan oleh kepentingan diri. — *communalism*, yaitu prinsip bahwa pengetahuan tidak boleh tertutup dan dimonopoli hanya oleh sekelompok orang. — *organized skepticism*, yaitu kewajiban tiap anggota masyarakat ilmuwan untuk menilai karya rekan-rekannya dan mengemukakan penilaiannya. Suatu uraian tentang pemikiran Robert K. Merton ini terdapat dalam tulisan Norman W. Storer, "The Sociology of Science", dalam Talcott Parsons (Ed.), *Knowledge and Society* Washington: VOA Forum Lecture, 1973).

3 Yang pertama diadakan di Universitas Jember, Jember 20-23 November 1980. Yang kedua di Universitas Sriwijaya, Palembang, 20-23 Januari 1982.

4 Toeti Heraty Noerhadi & EKM Masinambow, *Aspek-aspek Metodologis Dalam Penelitian*

mun yang tercapai dalam analisa terakhir adalah tipe-tipe orientasi sosial budaya di daerah-daerah yang diteliti.⁵ Dikatakan menarik karena ada pergeseran aksen yang cukup kentara antara apa yang tercantum dalam rencana penelitian dan apa yang tercapai dalam analisa akhir (pada tahap ini). Suatu tipologi berusaha menunjukkan *pola-pola*, yang kurang lebih bersifat tetap pada orientasi sosial budaya suatu komunitas, sementara proses penerusan nilai-nilai antargenerasi akan menunjuk kepada *dinamika*, yang mengandung berbagai kemungkinan, baik kemungkinan untuk bertahannya nilai-nilai maupun kemungkinan berubahnya nilai-nilai tersebut.

Dengan menggunakan kuesioner kedua tujuan itu memang bisa tercapai sekaligus, karena pertanyaan-pertanyaan diajukan masing-masingnya kepada responden yang mewakili generasi tua dan generasi muda. Dengan demikian jawaban tentang suatu pokok—misalnya tentang fungsi kerja—dapat dibandingkan menurut generasi respondennya. Kalau terbanyak jawaban dari kelompok muda dan kelompok tua menunjukkan kesamaan, maka secara inferensial diambil kesimpulan bahwa penerusan nilai-nilai antar-generasi dalam kasus tersebut adalah berhasil, dan itu berarti juga bahwa para orangtua cukup berhasil mengembangkan kemampuan pedagogis mereka.⁶

Kemudian perbandingan isi jawaban antar-komunitas akan memperlihatkan distribusi jawaban, yang telah dikelompokkan ke dalam kategori-kategori dan berdasarkan perbandingan frekuensi kategori itu disusunlah pola-pola jawaban, yang menjadi dasar untuk pola-pola orientasi sosial budaya.

Ada dua hal yang perlu dicatat dalam hubungan ini. *Pertama*, pergeseran aksen dari masalah "penerusan nilai-nilai antar-

Orientasi Sosial Budaya, LIPI, Universitas Sriwijaya, 1982, hal. 2.

5 Mochtar Buchori dan Wiladi Budiharga, *Tipe-tipe Orientasi Sosial Budaya di Sembilan Daerah Penelitian di Indonesia*, LIPI, IAIN Antasari, 1983. Lihat juga *id.*, "Pola dan Dinamika Orientasi Sosial Budaya di Lima Masyarakat di Indonesia", *Prisma* Maret 1982.

6 Mochtar Buchori dan EKM Masinambow, *Rancangan Dasar Untuk Suatu Penelitian Lapangan*, LIPI, 1981, hal. 3.

generasi" kepada masalah "pola-pola orientasi sosial budaya", kiranya bukanlah suatu pergeseran yang menyeleweng, tetapi justru merupakan pergeseran logis yang "dipaksakan" oleh penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini. Salah satu kekuatan terpenting dari metode ini ialah menunjuk distribusi frekuensi dari gejala-gejala sosial yang diamati.⁷ Karena itu pun sangat tidak mengherankan bahwa hasil akhir yang tercapai dalam tahap ini adalah suatu distribusi jawaban-jawaban responden di sembilan daerah penelitian setelah jawaban-jawaban tersebut dikategorikan berdasarkan tujuh parameter.⁸ Sudah bisa diharapkan bahwa yang akan menonjol dan yang lebih mengesankan dalam tabel-tabel adalah lukisan/gambaran persebaran kategori-kategori jawaban tersebut dan bukannya suatu gambaran tentang perbandingan pandangan orang muda dan orang tua, meskipun hal ini masih sempat diselamatkan juga karena proporsi jawaban dari kedua generasi itu hampir selalu (tidak semuanya) disertakan juga.

Hal yang *kedua*, adalah konsep tentang kemampuan pedagogis orangtua dalam meneruskan nilai-nilai kepada anak-anak mereka. Kemampuan mendidik dari para orangtua diukur dalam perbandingan lurus dengan tingkat kesamaan pandangan antara orang tua dan orang muda/remaja, dan ketidakmampuannya pun diukur dalam perbandingan lurus dengan tingkat perbedaan pandangan antara kedua kelompok tersebut. Mungkin di sini kita perlu berbicara tentang prasangka generasi (*generation bias*) yang terselubung dan tersirat di dalam konsep kemampuan pedagogis ini. Sebagai contoh, kalau beberapa kelompok remaja ternyata menganut nilai-nilai lain yang berbeda dari nilai orangtua mereka, dan yang dari segi ukuran tertentu—misalnya dari segi

etos kerja—lebih dapat diterima, apakah di sini pun kita harus berbicara tentang ketidakmampuan pedagogis orangtua, ataukah kita harus berbicara tentang kemampuan sosialisasi kaum remaja dalam menerima nilai-nilai baru? Bahaya dari konsep tentang kemampuan pedagogis orangtua yang demikian itu ialah bahwa semakin konservatif generasi muda semakin berhasil pula orangtua dalam tugas pendidikannya, dan kemajuan yang terjadi pada generasi muda (yaitu kemajuan yang dimungkinkan oleh penerimaan nilai-nilai baru) hanya akan membuktikan ketidakmampuan pedagogis orangtua. Logika ini kalau diteruskan akan menghasilkan pikiran yang *absurd* belaka: para orangtua sebaiknya gagal dalam mendidik anak-anaknya, supaya generasi muda semakin mendapat kesempatan dan kemungkinan untuk maju. Dalam hubungan dengan strategi kebudayaan, maka perlu dipertanyakan masalah apa yang sebetulnya lebih strategis untuk diteliti: kemampuan pedagogis orangtua atau kemampuan sosialisasi orang muda, dan yang mana pula dari kedua hal itu yang lebih mempunyai kemungkinan untuk "menjamin berlangsungnya pembangunan nasional sebagai suatu proses budaya"?

Untuk mengambil contoh, penelitian tentang fungsi kerja di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sebagian terbesar orangtua (35,5 persen) di tiga komunitas (kota besar, kota kecil dan desa) berpendapat bahwa hidup adalah untuk bersenang-senang. Sebaliknya mayoritas responden remaja (62,2 persen) berpendapat hidup adalah untuk bekerja keras.⁹ Juga dalam studi kasus di Sumatera Utara ditunjuk adanya pergeseran pengertian tentang *rantau* yang mulai terlihat pada kaum muda Minang. Mulai diragukan siklus rantau-kampung halaman yang menjadi keyakinan orangtua mereka. Mulai dipertanyakan apakah rantau memang hanya tempat tinggal sementara, saat mengumpulkan harta dan ilmu untuk dibawa pulang ke kampung halaman dan membuat semarak tanah Minang? Keraguan ini timbul antara lain karena kaum muda ini pun meli-

7 Peter L. Berger and Hansfried Kellner, *Sociology Reinterpreted*, (New York: Anchor Press, 1981), hal. 128 ff.

8 Ketujuh parameter tersebut adalah pandangan tentang: makna hidup, fungsi kerja, kemampuan ideal, karakteristik ideal, dasar keberhasilan usaha, penggunaan uang berlebihan, dan makna agama. Dalam analisa tentang tipe-tipe orientasi sosial budaya di sembilan daerah penelitian parameter makna agama belum dimasukkan. Lihat catatan kaki no. 5.

9 Tim peneliti daerah Sulawesi Selatan, *Pandangan Tentang Fungsi Kerja: Studi Kasus Sulawesi Selatan*, LIPI, IAIN Antasari, 1983, hal. 4.

hat bahwa orangtua mereka sebetulnya tidak kerasan tinggal di kampung, banyak yang ingin mati di rantau di mana berkumpul semua anak-cucu mereka, sementara rumah-rumah moderen di kaki gunung Singgalang bertambah kosong dan sepi.¹⁰

Dalam kasus Sulawesi Selatan menarik untuk mempertanyakan apakah data penelitian menunjuk ketidakmampuan pedagogis orangtua dalam meneruskan pandangan bahwa hidup adalah untuk bersenang-senang, atautkah data tersebut justru menunjuk hal yang sebaliknya yaitu kemampuan orang muda dalam mensosialisasi (dan menginternalisasi) pandangan tentang hidup sebagai kerja keras yang tidak (atau hanya sedikit) dianut oleh orangtua mereka? Demikian pun kasus Sumatera Utara menunjukkan adanya pengertian baru tentang rantau pada kaum muda Minang yang mulai mempersoalkan siklus rantau-kampung halaman. Dalam kerangka strategi kebudayaan menarik untuk dipersoalkan, apakah pandangan baru tentang rantau barangkali lebih strategis (misalnya lebih sesuai dengan program integrasi nasional), dan karena itu daripada berbicara tentang ketidakmampuan pedagogis orangtua, bukankah lebih berguna berbicara tentang kemampuan sosialisasi orang muda?

Di samping prasangka generasi, ada pula prasangka ideologi pendidikan. Karena apakah kemampuan mendidik memang hanya berarti meneruskan nilai-nilai orangtua kepada anak-anak mereka atautkah sebetulnya berarti *Hilfe zur Selbsthilfe* (yaitu membantu anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka ini pada akhirnya sanggup menemukan nilai-nilai mereka sendiri)? Nampaknya pada titik ini dipertaruhkan juga sifat pendidikan yang diberikan: apakah dia lebih menunjang semakin diperkuatnya *status quo* atau dia disiapkan untuk menerima perubahan secara kreatif.

III

Nampaknya kesulitan dalam memilih me-

10 Usman Pelly dan Darmono, *Pandangan Tentang Makna Hidup dan Transisionalitas Masyarakat: Studi Kasus Sumatera Utara*, LIPI, IAIN Antasari, 1983, hal. 12. Penelitian ini satu-satunya yang menggunakan metode kualitatif pada tahap pene-

tode yang digunakan dalam penelitian ini sudah disadari sejak awal oleh para perencana penelitian. Sangat disadari misalnya bahwa meskipun metode kualitatif adalah metode yang tepat untuk penelitian sejenis ini, namun yang sebaiknya dipakai adalah metode kuantitatif, karena cara ini lebih menghemat waktu (dan itu berarti lebih menghemat dana juga). Metode kualitatif akan memerlukan lebih banyak waktu di lapangan, yaitu antara enam bulan sampai satu tahun.¹¹

Untuk mengimbangi keterbatasan metode kuantitatif, maka dalam penelitian lapangan, selain digunakan kuesioner, diadakan pula wawancara mendalam, yang dibantu pula oleh hasil-hasil penjajagan sepintas (*rapid reconnaissance*).¹² Bisa diduga bahwa baik wawancara maupun penjajagan sepintas akan menyumbangkan aspek-aspek kualitatif, yang dapat melengkapi atau di mana perlu mengoreksi temuan-temuan berdasarkan kuesioner. Masalahnya memang: apakah mungkin mengintegrasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam satu penelitian? Dalam kasus penelitian ini pertanyaannya adalah: apakah hasil-hasil penjajagan sepintas dan wawancara memang digunakan juga dalam analisa data yang diperoleh melalui kuesioner? Pertanyaan ini kiranya pantas diajukan, karena hal seperti itulah yang kiranya ingin dicapai apabila dalam rencana penelitian dinyatakan bahwa kuesioner akan disertai dengan wawancara dan didahului oleh penjajagan sepintas.

Dilihat dalam lingkup lapangan maka data-data dari jawaban responden akan mencerminkan kekuatan dan bobot suatu data dalam sampel yang diambil dan dalam perbandingan data antarkomunitas. Sebaliknya hasil-hasil dari wawancara dan penjajagan lapangan bisa membantu untuk mengukur/memperkirakan kekuatan dan bobot suatu data dalam konteks sosial komunitas yang diteliti. Contoh soal adalah penelitian di Kalimantan Selatan. Jawaban responden

litian ini.

11 Toeti Heraty Noerhadi dan EKM Masinambow, *Aspek-aspek Metodologis Dalam Penelitian Orientasi Sosial Budaya*, LIPI, Universitas Sriwijaya, 1982, hal. 6.

12 Toeti Heraty Noerhadi dan EKM Masinambow, *op.cit.*, hal. 5.

memperlihatkan bahwa sebagian besar dari mereka menganggap hidup adalah tantangan yang harus diatasi dengan kerja keras (97,8 persen). Jika dibandingkan dengan komunitas di Sulawesi Selatan persentase itu sangat tinggi, karena dalam tiga komunitas yang diteliti di Sulawesi Selatan hanya terdapat 47 persen dari responden yang menganggap hidup itu untuk bekerja keras. Namun bobot/kekuatan jawaban dari Kalimantan Selatan itu (apakah *reliable* atau tidak?), baru diketahui dari hasil peninjauan sepintas yang dilaporkan oleh peneliti lapangan.

Menurut hasil pengamatan di lapangan dilaporkan bahwa "nilai tersebut (yaitu: kerja keras, IK) belum tercermin sepenuhnya dalam kenyataan . . ." Karena "di beberapa kalangan orang Banjar sering terlihat adanya berbagai kebiasaan santai seperti nongkrong di warung teh, ngobrol di pinggir jalan, bermain kartu atau catur pada waktu dan bahkan di tempat kerja, yang kesemuanya mengesankan bahwa mereka ini banyak menyia-nyiakan waktu yang seyogyanya dimanfaatkan untuk bekerja." Peneliti tersebut malahan "memperoleh kesan yang mendalam, bahwa di kalangan petani yang nampak bekerja keras sebenarnya terselip cita-cita untuk hidup santai pada suatu saat di kemudian hari, yaitu setelah sawahnya cukup ia akan menyerahkan sawahnya kepada petani lain atas dasar sewa atau bagi hasil, tanpa menckuni sawahnya selanjutnya."¹³

Dengan membandingkan hasil pengamatan dan peninjauan lapangan orang kiranya bisa lebih merelativir angka 97,8 persen yang diperoleh melalui kuesioner. Sebaliknya kalau angka ini diangkat begitu saja ke dalam analisa data, maka tak bisa tidak memang harus diambil kesimpulan bahwa komunitas-komunitas yang diteliti di Kalimantan Selatan memperlihatkan ciri-ciri orientasi sosial budaya yang individualistik-kompetitif (*sic!*).¹⁴

13 Kutipan-kutipan tersebut diambil dari: Al-fani Daud, *Pandangan Tentang Makna Hidup dan Transisionalitas Masyarakat: Studi Kasus Kalimantan Selatan*, LIPI, IAIN Antasari, hal. 31.

14 Mochtar Buchori dan Wiladi Budiharga, *Tipe-tipe Orientasi Sosial Budaya di Sembilan Daerah Penelitian di Indonesia*, LIPI, IAIN Antasari, 1983, hal. 36, matrix 3.

Penelitian tentang makna agama memperlihatkan kesulitan yang masih jauh lebih besar. Di sini pun pendapat responden direkam melalui kuesioner, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dikatakan sebagai *open ended question* (pertanyaan terbuka).¹⁵ Namun demikian barangsiapa sempat memperhatikan bentuk pertanyaan dan urutan susunan pertanyaan akan segera mendapat kesan, bahwa satu dua pertanyaan penting justeru karena bentuknya atau karena urutan letaknya dalam daftar sebetulnya adalah *leading question* (pertanyaan menggiring). Contoh soal adalah pertanyaan tentang makna agama sendiri. Pertanyaan itu ditempatkan pada urutan terakhir. Sebelumnya responden ditanya pendapatnya tentang: hakekat bencana alam (sebagai peristiwa alamiah atau tindakan Tuhan), tentang saat-saat orang merasa dekat dengan Tuhan, tentang peranan pemimpin dan organisasi keagamaan, tentang hal-hal yang memudahkan atau menjauhkan suasana keagamaan, tentang pertentangan karena perbedaan agama, dan pada akhir sekali muncul pertanyaan: "Jadi, apakah arti agama bagi kehidupan anda?" Siapa pun bisa merasakan bahwa pertanyaan terakhir itu sebetulnya berarti dan berbunyi: "Jadi, (berdasarkan semua jawaban di atas) apakah arti agama bagi kehidupan anda?" Pertanyaan terakhir ini pada hakekatnya bukanlah pertanyaan terbuka, karena responden secara "tersembunyi" telah disuruh memberi jawaban berdasarkan jawaban atas pertanyaan sebelumnya.¹⁶

Implikasi dari keadaan ini kiranya sudah jelas dengan sendirinya. Jawaban responden tentang makna hidup dapat diragukan validitasnya. Yaitu apakah jawaban itu lebih banyak mencerminkan pandangan responden atau mencerminkan pandangan si penanya dan penyusun kuesioner?

Masalah yang kedua ialah bahwa jawaban-jawaban responden tentang makna agama kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori—yaitu agama sebagai pegangan hidup, sebagai kumpulan peraturan dan sebagai jalan menuju Tuhan—tanpa ada

15 Analiansyah, *Pandangan Tentang Makna Agama: Studi Kasus Kalimantan Timur*, LIPI, IAIN Antasari, 1983, hal. 22.

16 *Daftar Pertanyaan Proyek Penelitian Strategi Kebudayaan*, LIPI, 1983-1984, hal. 3-6.

penjelasan yang cukup terperinci tentang mengapa dan bagaimana caranya jawaban responden telah dikelompokkan ke dalam tiga kategori tersebut. Kita misalnya tidak tahu apakah kategori agama sebagai pegangan hidup memang benar-benar berbeda dari agama sebagai kumpulan peraturan. Karena, adalah sangat mungkin membayangkan bahwa seseorang memandang agama sebagai kumpulan peraturan yang merupakan pegangan hidup. Di samping itu agak aneh juga membayangkan, bahwa seseorang menerima agama hanya sebagai kumpulan peraturan. Karena persoalan lalu timbul: peraturan apa dan untuk tujuan dan maksud apa? Di sinilah menjadi penting untuk mencatat kembali bahwa "salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam setiap sistem klasifikasi dalam menyusun informasi deskriptif bagi tujuan ilmiah adalah sedapat-dapatnya penyajian butir-butir informasi harus lengkap dan mendalam (*exhaustiveness*) untuk tujuan eksplanasi."¹⁷

Dalam persoalan makna agama, kesulitan menjadi diperbesar karena jawaban responden diandaikan tidak lagi merupakan informasi semata-mata, melainkan sudah banyak mengandung unsur interpretasi. Ada perbedaan besar dalam kadar informasi dalam jawaban terhadap dua jenis pertanyaan di bawah ini:

1. Di manakah anda tinggal, sudah berapa lama, apakah anda sudah berkeluarga, apa kerja anda?

2. Apa arti agama bagi anda, adakah pengalaman keagamaan yang sangat mengesankan dan mengapa, situasi apa saja yang menurut anda menjauhkan suasana keagamaan?

Jawaban terhadap kelompok pertanyaan pertama berisi informasi yang hampir murni sifatnya, yang selalu bisa diuji kebenarannya melalui observasi. Jawaban terhadap pertanyaan kedua sudah banyak berisi interpretasi dan hanya dapat diuji/diperkirakan kebenarannya melalui komunikasi yang cukup intensif dengan responden, dan tidak pernah akan bisa diuji melalui observasi.

Secara teknis-metodologis pertanyaan-pertanyaan dari kelompok pertama dinamakan pertanyaan empiris, yaitu pertanyaan mengenai gejala yang dapat diamati, sedangkan pertanyaan dari kelompok kedua bersifat *hermeneutis*, yaitu yang menyangkut aktivitas manusia yang harus dipahami dan ditafsirkan maknanya.¹⁸

Pokok permasalahan ialah bahwa makna adalah suatu hakekat kualitatif, yang ditentukan oleh suatu dimensi kedalaman (*depth dimension*). Dan dimensi kedalaman ini tidak akan tertangkap seandainya pun sampel diperluas sejauh mungkin untuk menjangkau lebih banyak data. Berarti, kita belum mendapat banyak pengertian setelah dihitung dengan presisi tinggi berapa persen dari sampel yang menganut pandangan bahwa agama adalah pegangan hidup: Kalimantan Timur 72,2 persen,¹⁹ Lampung 68,9 persen,²⁰ Sulawesi Tengah 41,1 persen.²¹ Untuk menguji seberapa banyak pengertian yang dapat kita peroleh angka-angka tersebut, dapatlah diajukan pertanyaan: kesimpulan teoritis atau kesimpulan praktis manakah yang dapat ditarik dari persentase itu? Misalnya apakah secara teoritis dapat disimpulkan (diinferensikan) bahwa agama cukup fungsional dalam kehidupan ketiga daerah itu?²² Sangat meragukan! Karena yang diteliti adalah *pandangan* responden, dan tidak ada petunjuk atau jaminan bahwa pandangan itu dihayati juga dalam kehidupan nyata.

Lebih jauh, ada dilema epistemologis yang sangat serius dalam kasus ini. Bisa

18 Pengertian tentang sifat empiris dan sifat hermeneutis pengetahuan sebagaimana yang dipakai dalam karangan ini, berasal dari Juergen Habermas dalam esainya "Erkenntnis und Interesse", yang dimuat kembali dalam bukunya: *Technik und Wissenschaft als Ideologie*, (Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag 1981). Suatu uraian singkat tentang pemikiran Habermas ini terdapat dalam karangan saya, Ignas Kleden, "Teori Ilmu Sosial Sebagai Variabel Sosial", *Prisma*, Juni 1983.

19 Analiyah, *op.cit.*, hal. 25.

20 Soleman B. Taneko, *Pandangan Tentang Makna Agama: Studi Kasus Lampung*, LIPI, IAIN Antasari, 1983, hal. 7, 8.

21 Soleman Mamar, *Pandangan Tentang Makna Agama: Studi Kasus Sulawesi Tengah*, LIPI, IAIN Antasari 1983, hal. 7.

22 Abdurrahman Wahid dan M.M. Billah, *Pandangan Tentang Makna Agama: Tinjauan Analitis Komparatif*, LIPI, IAIN Antasari 1983, hal. 58 ff.

17 T. Ibrahim Alfian, *Pembahasan Terhadap Makalah Pandangan Tentang Makna Agama, Studi Kasus Kalimantan Timur, Lombok, Lampung dan Sulawesi Tengah*, LIPI, IAIN Antasari, 1983, hal. 2.

dikatakan bahwa hasil ini memang hanya mencerminkan pandangan responden, dan belum menunjukkan bagaimana *in concreto* mereka menghayati agama mereka. Argumen ini tidak ada gunanya, karena suatu pandangan barulah menjadi orientasi sosial budaya kalau dia menjadi bagian dari penghayatan hidup para penganutnya. Sebaliknya kalau dikatakan bahwa pandangan yang direkam melalui kuesioner itu diandaikan pula sebagai petunjuk tentang penghayatan agama mereka, maka timbul kesulitan bahwa tidak ada jaminan ataupun pegangan untuk menerima pengandaian seperti itu. Jawaban responden hanya menunjuk bahwa begitulah dia memandang agama, tetapi bagaimana dia menghayati agamanya dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diketahui dari data-data itu.

Dengan mengemukakan kesulitan-kesulitan ini mau ditunjukkan suatu persoalan yang pasti disadari sejak semula oleh perencana penelitian ini: Apakah masalah yang bersifat *hermeneutis* bisa diteliti dengan metode empiris-kuantitatif, hanya karena alasan praktis, yaitu waktu, dana dan tenaga? Dan mengapa pula dengan keterbatasan praktis itu tidak disusun suatu penelitian dengan ukuran yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh dana, tenaga dan waktu yang ada, tetapi yang hasil dan metodenya secara teoritis lebih bisa dipertanggungjawabkan?

Keberatan seperti ini sebetulnya sudah pernah pula diajukan secara sepintas lalu oleh pembahas lain yang menganjurkan pemakaian metode kelompok ilmu *Geisteswissenschaften* (yaitu metode hermeneutik) untuk penelitian-penelitian sejenis ini.²³ Dengan konsep *Geisteswissenschaften* sebetulnya hendak ditekankan perbedaan antara ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu tentang manusia dan kebudayaan. Yang dicari dalam kelompok ilmu alam adalah dalil-dalil umum atau generalisasi-generalisasi, yang memang dimungkinkan oleh uniformitas dalam gejala-gejala alam, yaitu oleh anggapan bahwa dalam kondisi yang sama, akan terjadi hal yang sama.²⁴ Sedangkan

yang dicari dalam kelompok ilmu-ilmu tentang manusia dan kebudayaan adalah keunikan dan individualitas (yaitu *Geist*) dari tiap kejadian atau aktivitas manusia. Karena itu yang dituntut di sini adalah suatu pemahaman—suatu *Verstehen*—dari dalam. Pemahaman dari dalam ini dimungkinkan dan diharuskan karena subyek yang mengetahui (yaitu peneliti) sekaligus mengambil bagian dalam menghasilkan obyek yang ditelitinya²⁵ (yaitu kebudayaan dan masyarakat).

Dari segi logika masing-masing kelompok itu maka bisa ditarik garis-garis perbedaan yang cukup tegas. Ilmu-ilmu alam menggunakan *logic of science* sedangkan *Geisteswissenschaften* menerapkan *logic of humanities*.²⁶ Yang pertama memandang gejala-gejala sebagai terpisah dari pengamat, tanpa saling pengaruh dengan pengamat dan karena itu dapat diobyektifkan. Nilai-nilai pengamat diandaikan tidak mempengaruhi bekerjanya gejala-gejala yang diamati, dan pengetahuan yang dihasilkan merupakan informasi yang bersifat bebas nilai. Karena munculnya gejala-gejala itu hanya tergantung dari kondisi luar—obyektif dan tidak tergantung dari "kemauan" gejala-gejala itu sendiri, maka ia selalu bisa diulang dengan cara menciptakan kondisi yang sama. Hal inilah yang memungkinkan pengujian kembali hasil pengamatan, berdasarkan pengulangan pengamatan semula atau dengan eksperimen. Ini berarti tingkah laku gejala-gejala inipun dapat diramalkan berdasarkan pengetahuan tentang kondisi-kondisi yang mempengaruhi munculnya suatu gejala. Perubahan dalam tingkah laku gejala adalah hasil dari perubahan kondisinya. Yang satu menjadi *independent variable* yang lain menjadi *dependent variable*. Adanya hubungan yang bersifat tetap (korelasi) antara gejala dan kondisi yang mempengaruhinya, menyebabkan dimungkinkannya dalil-dalil yang bersifat umum dan membuat

25 Juergen Habermas, *Erkenntnis und Interesse*, (Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag 1977) hal. 189.

26 Pembahasan yang sangat menarik dan cukup terperinci tentang pokok ini terdapat dalam: Juergen Habermas, *Zur Logik der Sozialwissenschaften*, (Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag 1977), bab I: "Der Dualismus von Natur — und Geisteswissenschaften".

23 Y.B. Mangunwijaya, *Bahasan Tinjauan Analitis Komparatif*, LIPI, IAIN Antasari, 1983, hal. 2-3.

24 K.R. Popper, *Das Elend des Historizismus*, (Tuebingen: JCB Mohr 1979) hal. 6.

kelompok ilmu-ilmu ini menjadi nomotetis.

Sebaliknya *logic of humanities* justru bertolak dari anggapan bahwa antara pengamat dan obyek yang diamatinya (yaitu manusia dan masyarakat) terdapat suatu hubungan yang erat dan saling pengaruh yang kuat, dan karena itu gejala-gejala yang diamati itupun tidak dapat diobyektifkan lagi. Nilai pengamat diandaikan mempengaruhi tingkah laku gejala yang diamatinya. Ini berarti tingkah laku dari gejala yang diamati tidak hanya bergantung pada kondisi-kondisi obyektif, melainkan kepada unsur kemauan dan kesadaran, baik dari obyek yang diamati, maupun dari yang melakukan pengamatan. Maka suatu gejala tidak pernah bisa diulang, karena kondisi obyektif yang samapun tidak pernah bisa dipertahankan. Dalam setiap pengulangan, maka gejala yang diamati itu sudah belajar tentang sesuatu dari pengulangan itu, dan ini membuat kondisi obyektif berubah. Ini berarti tingkah laku gejala itu tidak ditentukan semata-mata oleh kondisi obyektif, tetapi juga oleh kondisi subyektif. Dengan demikian sangat sulit berbicara tentang *dependent variable* dan *independent variable*, karena yang ada di sini sebetulnya *interdependent variables*. Prognose sangat sulit dilakukan karena kontrol terhadap kondisi obyektif yang samapun sangat sulit dilakukan. Maka dalil-dalil umum hampir mustahil diperoleh, dan kita hanya harus melakukan interpretasi gejala-gejala itu secara khusus, baik menurut tempat maupun menurut waktu. Jenis pengetahuan yang diperoleh hanya bersifat ideografis.²⁷

27 Suatu pembahasan singkat tentang metode *Geisteswissenschaft* dapat dibaca dalam Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia 1982) bab IV: "Beberapa Pemikiran Tentang Metodologi Sejarah." Untuk melukiskan secara impresif saja apa yang sebetulnya dimaksud dengan *Geisteswissenschaft* menurut pengertian seorang teoritikusnya yang pertama, Wilhelm Dilthey (1833-1911), maka di sini diturunkan tiga kutipan dari Dilthey: — Nun unterscheiden sich . . . von den Naturwissenschaften die Geisteswissenschaften dadurch, dass jene zu ihrem Gegenstände Tatsachen haben, welche im Bewusstsein als von aussen, als Phaenomene und einzeln gegeben auftreten, wogegen sie in diesen von innen, als Realitaet und als ein lebendiger Zusammenhang originaliter auftreten . . . — *Die Natur*

IV

Penelitian yang sedang dibicarakan ini mempunyai suatu ambisi lain lagi. Yaitu berusaha mendekati masalah orientasi sosial budaya dengan pendekatan induktif. Hal ini merupakan suatu percobaan yang baru.²⁸ Sudah bisa diduga bahwa hasrat yang tersembunyi di balik usaha ini ialah tekad untuk "bukan bertolak dari teori-teori yang sudah ada, tapi melupakan teori yang ada . . . terjun dalam masyarakat dan membangun teori dari bawah".²⁹ Ini pula barangkali sebabnya penelitian ini diberi sifat eksploratoris, karena tujuannya adalah "menentukan patok-patok pengarah untuk penelitian yang akan

erklaren wir, das Seelenleben verstehen wir. (cetak miring dari saya, IK). — So ist der Begriff der Geisteswissenschaft nach dem Umfang der Erscheinungen, der unter sie faellt, bestimmt durch die Objektivierung des Lebens in der aeusseren Welt. *Nur was der Geist geschaffen hat, versteht er.* (cetak miring dari saya, IK). — Die erste Bedingung fuer die Moeglichkeit der Geschichtswissenschaft liegt darin, dass ich selbst ein geschichtliches Wesen bin, dass der, welcher die Geschichte erforscht, derselbe ist, der die Geschichte macht. (cetak miring dari saya, IK). Terjemahannya: — Maka *Geisteswissenschaften* (ilmu-ilmu tentang manusia dan kebudayaan) berbeda dari ilmu-ilmu alam dalam hal ini, bahwa kenyataan-kenyataan yang menjadi obyek ilmu-ilmu alam muncul dalam kesadaran sebagai berasal dari luar, sebagai gejala-gejala, dan sebagai kenyataan-kenyataan yang bersifat partikular, sedangkan obyek *Geisteswissenschaft* merupakan kenyataan-kenyataan yang berasal dari dalam, yang muncul sebagai realitas, dan pada dasarnya sebagai suatu relasi yang hidup . . . *Alam dapat dijelaskan (di-explanasi) tetapi kehidupan rohani manusia hanya dapat dipahami.* — Dengan demikian menurut lingkup gejala-gejala yang dicakupnya, maka pengertian *Geisteswissenschaft* ditentukan oleh obyektivisasi kehidupan itu sendiri ke dalam dunia luar. *Roh manusia hanya memahami apa yang telah diciptakannya sendiri.* — Syarat pertama yang memungkinkan ilmu sejarah (sebagai bagian dari *Geisteswissenschaften*, IK) ialah bahwa saya sendiri adalah makhluk sejarah, dan bahwa dia yang meneliti sejarah adalah sekaligus dia yang membuat sejarah. Kutipan-kutipan ini diambil melalui Juergen Habermas, *Erkenntnis und Interesse* (Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag 1977), hal. 184 ff.

28 Lihat komentar Koentjaraningrat yang dimuat dalam harian *Kompas*, 1 Desember 1983, hal. XII.

29 Ucapan Mochtar Buchori, dimuat dalam harian *Kompas*, *ibid.*

dilaksanakan pada tahap berikutnya."³⁰

Ada tiga soal penting yang sebetulnya terdapat dalam ucapan-ucapan diatas. Yaitu pendekatan induktif, persoalan *theory-building* (penciptaan teori) dan sifat eksploratoris penelitian. Untuk keperluan karangan ini — yaitu suatu tinjauan metodologis— mungkin ada gunanya untuk melihat ketiga soal itu sekurang-kurangnya dari dua sudut pandangan. *Pertama*, bagaimana kedudukan metodologis ketiga hal tersebut dalam ilmu-ilmu sosial; dan *kedua*, bagaimana hubungan ketiga hal tersebut dalam penelitian ini.

Semenjak lewatnya masa *grand theories* (akhir abad ke-19—tahun 1920-an) mungkin tak ada lagi ilmuwan sosial yang serius, yang mau berbicara tentang penciptaan teori hanya "dari atas", yaitu hanya dengan berdasarkan logika, spekulasi atau renungan, dan tanpa mendasarkannya pada suatu penelitian lapangan, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang dilakukan orang lain. Kalau suatu penelitian berhasil menyusun sejumlah kategori dari data yang dikumpulkannya, dan mengintegrasikan kategori-kategori itu dengan hipotesa yang disusunnya, kemudian mengintegrasikan semua hipotesanya dalam satu konsep yang lebih bulat, maka kita lebih cenderung menamakannya, penciptaan teori "dari bawah" (meskipun penyusunan kategori dan hipotesa hampir tak mungkin dilakukan tanpa bantuan teori-teori yang sudah ada, jadi dengan bantuan "dari atas"). Sebaliknya bila suatu teori baru lahir, sebagai hasil pengujian teori lama berdasarkan data-data lapangan (verifikasi dan falsifikasi) kita lebih cenderung berbicara tentang penciptaan teori "dari bawah dan dari atas" sekaligus. Persoalannya mungkin bukan terletak pada asal-usul teori "dari langit atau dari bumi", tetapi pada beberapa soal lain.

Soal yang pertama ialah apakah tepat memakai metode kuantitatif, untuk penelitian yang bersifat eksploratoris. Kesulitannya karena dalam "menentukan patok-patok untuk penelitian berikut" maka banyak aspek kualitatif di lapangan justeru luput dari jaringan kuantifikasi dan statistik. Metoda kuantitatif cenderung membatasi patok-patok, yang mungkin bisa diperoleh lebih ba-

nyak lagi seandainya digunakan metode kualitatif.

Hal kedua ialah bahwa dengan metode yang mencontoh pada statistik, tahap-tahap pengumpulan data, penyusunan kategori, hipotesa dan konsep, diperlakukan sebagai tahap yang terpisah, yang satu mendahului yang lainnya. Sedangkan untuk keperluan penciptaan teori "dari bawah" jauh lebih menguntungkan jika tahap-tahap penelitian itu diadakan secara serempak di lapangan. Keuntungannya ialah tidak ada pemaksaan kategori terhadap data seperti yang sangat mungkin terjadi apabila kategorisasi diadakan terpisah dari lapangan. Sebaliknya kategori selalu bisa "ditaklukkan" lagi dan disesuaikan kembali dengan data, apabila keduanya diadakan serempak di lapangan, sebagaimana yang dianjurkan oleh pendekatan *grounded research* misalnya.³¹ Contoh soal terdapat pada penelitian tentang makna agama. Dalam kuesioner yang diedarkan terdapat sebuah pertanyaan yang berbunyi: "Pada saat-saat apa dalam kehidupan anda, anda merasa lebih dekat kepada Tuhan?"³² Rupanya untuk beberapa jawaban sudah disiapkan kategori yang diberi nama *situasi nonreligius*, yaitu situasi-situasi terlepas musibah, terlepas dari bahaya maut, saat mendapat keuntungan besar, saat mau melahirkan, saat orang menderita sakit atau mengalami kegembiraan besar. Dari penelitian di tiga tempat ternyata bahwa pada saat-saat seperti itu cukup banyak orang merasa dekat dengan Tuhan: Kalimantan Timur 79,5 persen, Lampung 69,2 persen, Sulawesi Tengah 81 persen.³³ Rata-rata adalah 76,56 persen. Berarti bahwa sebagian terbesar responden memang merasa bahwa pada saat-saat yang tertentu itu mereka merasa dekat dengan Tuhan, dan itu berarti berada dalam suasana yang religius. Akan tetapi karena kategori "situasi nonreligius" rupanya sudah ditetapkan pada saat-saat penyusunan kategori, maka dengan temuan seperti itu-

31 Stuart A. Schlegel, *Grounded Research Di dalam Ilmu-ilmu Sosial*, PLPIS, Banda Aceh, 1976, hal. 13 ff.

32 *Daftar Pertanyaan Proyek Penelitian Studi Strategi Kebudayaan*, LIPI, 1983-1984, hal. 4.

33 Untuk tiap-tiap persentase tersebut, lihat Analihsyah, *op.cit.*, hal. 25. Soleman B. Taneko, *op.cit.*, hal. 5-6. Soleman Mamar, *op.cit.*, hal. 9.

30 Mochtar Buchori dan Wiladi Budiharga, dalam *Prisma*, Maret 1982, *loc.cit.* hal. 3.

pun kategori "situasi nonreligius" tetap dipertahankan. Seandainya penyusunan kategori itu diadakan di lapangan maka dengan segera bisa ditentukan bahwa situasi-situasi dimana terbanyak orang merasa dekat dengan Tuhan haruslah menjadi kategori "situasi religius".

Pemaksaan kategori seperti itupun nampak jelas sekali dalam analisa tentang tipe-tipe orientasi sosial-budaya. Pemakaian kategori-kategori seperti: individualistik-kolektivistik, kompetitif-kooperatif, idealistik-realistik terasa agak dipaksa-paksakan. Dan kalau dikatakan bahwa konsep-konsep tersebut dipakai secara provisoris untuk pengertian yang lebih terbatas, maka penggunaan konsep-konsep itu terasa cukup arbitrer dan mengundang risiko tergebaknya orang ke dalam nominalisme epistemologis semata-mata.³⁴ Contoh soal adalah jawaban-jawaban responden tentang makna hidup yang dikelompokkan ke dalam kategori "hidup sebagai tantangan" kemudian dimasukkan ke dalam orientasi sosial-budaya yang individualistik. Sedangkan jawaban-jawaban yang dikelompokkan ke dalam kategori "hidup untuk mengabdikan" kemudian dimasukkan ke dalam orientasi sosial budaya dari tipe yang kolektivistik. Selanjutnya jawaban-jawaban tentang fungsi kerja untuk kategori "kepuasan pribadi" kemudian dimasukkan ke dalam tipe orientasi sosial budaya yang kompetitif. Sedangkan pandangan yang menganggap bahwa keberhasilan usaha tergantung dari bantuan orang lain, dimasukkan ke dalam tipe orientasi sosial-budaya yang kooperatif. Kemudian apabila ada jawaban-jawaban yang mengatakan bahwa uang berlebih digunakan untuk investasi, maka kelompok pandangan ini kemudian dimasukkan ke dalam tipe orientasi sosial-budaya yang idealistik. Sebaliknya mereka yang bercita-cita untuk mendapatkan penghasilan yang dapat diandalkan dimasukkan ke dalam tipe orientasi sosial-budaya yang

realistik.³⁵

Orang kiranya tidak perlu menjadi ahli filsafat untuk segera merasakan betapa jauh jarak antara istilah (penamaan) yang digunakan untuk menyebut tipe-tipe ini dengan isi tipe itu sendiri. Dengan kata lain ada diskrepansi yang cukup lebar antara istilah dan konsep yang hendak ditunjukkannya. Dalam tipe individualistik-kolektivistik misalnya kita tak mendapat keterangan sama sekali tentang konsep hak milik (perorangan atau bersama) yang menjadi salah satu ciri terpenting untuk paham individualisme maupun kolektivisme. Dan adakah suatu suku bangsa di Indonesia yang memang beranggapan bahwa masyarakat hanyalah sekedar jumlah individu, yang merupakan pandangan sosial kaum individualis?

Sudah bisa dipastikan bahwa pemakaian-pemakai istilah tersebut menyadari juga semua keberatan di atas. Hanya memanglah bukan perkara yang selalu mudah untuk mendapatkan nama/istilah yang cocok untuk menunjuk tiap tipe orientasi sosial-budaya yang bisa "ditarik" dari hasil penelitian ini. Karena itu adalah jauh lebih gampang mengambil istilah-istilah yang sudah terkenal sambil memakainya dengan isi konseptual yang jauh lebih terbatas. Namun demikian, improvisasi yang berlebihan dalam hal ini—dan saya berpendapat pemakaian istilah-istilah ini untuk keperluan tipologi orientasi sosial-budaya ini adalah cukup berlebihan dan memberi kesan arbitrer—bisa menyesatkan dan membuat tipologi ini tidak dianggap serius.

Kesan lain yang muncul ialah bahwa sekalipun penelitian ini berhasrat membangun teori "dari bawah", namun penggunaan istilah-istilah tersebut sudah menunjuk pada teori-teori mana para penulis analisa ini bergantung. Kalau diambil garis pisah antara orientasi-orientasi yang individualistik-kompetitif-idealistik (dalam arti *future-oriented*) pada satu sisi, dan orientasi-orientasi yang kolektivistik-kooperatif-realistik di sisi yang lain, maka sebetulnya kelompok pertama itu adalah semua atribut dari modernitas dalam teori-teori modernisasi sedangkan

34 Dalam epistemologi, nominalisme adalah paham bahwa suatu istilah atau suatu terminus, hanyalah nama belaka yang sekedar ditempelkan pada sebarang konsep. Penamaan itu tidak ditentukan oleh, dan tidak ada hubungan dengan substansi dari apa yang ditunjukkannya. Lihat misalnya K.R. Popper, *Das Elend des Historizismus*, (Tuebingen, JCB Mohr, 1979), hal. 21-27.

35 Mochtar Buchori dan Wiladi Budiharga, *Tipe-tipe Orientasi Sosial Budaya di Sembilan Daerah Penelitian di Indonesia*, LIPI, IAIN Antasari, 1983, hal. 32 ff.

kelompok lain merupakan atribut dari tradisi.³⁶ Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan yang sangat penting: apakah mungkin seorang peneliti turun ke lapangan dengan "melupakan teori-teori yang ada?" Pilihan yang barangkali lebih-lebih mungkin dan lebih berguna adalah membuat eksplisit pendirian teoritis yang dianut, agar supaya pengaruh dan *dirigisme* yang ditimbulkannya akan lebih bisa dikontrol di lapangan. Ini kiranya lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada berusaha melupakan teori yang sudah ada, yang kemudian ternyata menjalarkan pengaruhnya dengan diam-diam dan atas cara yang mungkin tak disadari.

V

Tinjauan ini memang sengaja mengambil posisi metodologis, dan ditulis oleh orang luar yang tidak terlibat langsung dalam penelitian ini. Dalam kalangan peserta penelitian ini sendiri persoalan metodologi kurang lebih dianggap sudah dibereskan, khususnya dalam seminar pertama di Jember. Karena itu diharapkan diskusi dan kritik sebaiknya dipusatkan pada masalah substansi.³⁷ Namun demikian dalam karangan ini dianut anggapan bahwa metode dan teknik yang digunakan sering menentukan wujud substansi yang dicapai dalam penelitian. Dan karangan ini berusaha bertolak dari substansi hasil penelitian, untuk menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan yang muncul dalam menjelaskan hasil-hasil penelitian ini memang sebagian besar bersumber pada kesulitan dan masalah metodologis. Sebaliknya tidak pula dianut keyakinan bahwa metodologi adalah segala-galanya dalam penelitian, dalam arti bahwa tidak setiap orang yang sangat terlatih dalam urusan metodologis akan memberikan penelitian dengan hasil yang lebih memuaskan. Kepekaan peneliti, *sociological imagination*-nya ataupun sikap pribadinya dalam berhadapan dengan kelompok yang ditelitinya, pastilah sama pentingnya untuk keber-

hasil penelitiannya.

Akan tetapi yang merangsang timbulnya tinjauan ini adalah tujuan penelitian itu sendiri, baik tujuan praktisnya yaitu menyumbang terbinanya pengertian yang lebih sistematis dan lebih dapat dipertanggungjawabkan tentang berbagai komunitas di Indonesia, melalui pemahaman yang semakin tepat tentang orientasi sosial-budaya mereka, maupun tujuan teoritisnya yaitu mempertegas pengertian sosial-budaya, supaya jangan hanya menjadi semacam "keranjang sampah." Maksudnya adalah bahwa soal-soal yang tidak ditangani oleh suatu bidang ilmu lain, kemudian dimasukkan saja ke dalam kelompok sosial-budaya.³⁸

Dalam hubungan dengan usaha mengadakan tipologi orientasi budaya, maka tipe-tipe yang disusun berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat mengoreksi stereotype-stereotype yang hidup selama ini baik tentang suatu kelompok etnis maupun tentang suatu komunitas antar-etnis. Yang patut disayangkan ialah bahwa usaha memperbaiki stereotype-stereotype populer tentang berbagai komunitas di Indonesia, akhirnya tergiring masuk ke dalam stereotype-stereotype ilmiah seperti individualisme-kolektivisme, kooperasi-kompetisi ataupun idealisme realisme. Hanya dengan berpegang pada konsep-konsep besar yang sangat umum dan penuh konotasi ideologis itu, pengertian kita tentang tiap komunitas yang diteliti hanya belum bertambah jelas. Ini sekaligus berarti bahwa pengertian kita tentang "sosial-budaya" pun secara ilmiah tidak menjadi lebih jelas dari semula.

Di sini hanya dikemukakan suatu kesan, bahwa sangat mungkin kekaburan pengertian sosial-budaya itu telah turut disebabkan pula oleh kenyataan bahwa jarang sekali ditegaskan perbedaan antara sosial budaya sebagai suatu bidang persoalan, bidang penelitian dan pokok analisa, dan sosial-budaya sebagai pendekatan atau perspektif. Dengan pendekatan sosial-budaya, maka banyak aspek dari suatu masalah, misalnya alih teknologi, yang ditangani secara teknis-disiplin (dalam hal ini teknik dan ekonomi), dan yang terluput dari perhatian karena

36 Lihat misalnya Alex Inkeles, "The Modernization of Man", dalam Myron Weiner (Ed.), *Modernization: The Dynamics of Growth*, Washington: VOA Forum Lecture.

37 Lihat komentar-komentar Slamet Rahardjo, Abdurrahman Wahid dan EKM Masinambow dalam harian *Banjarmasin Post*, 30 November 1983.

38 Lihat wawancara dengan Mochtar Buchori, dalam *Banjarmasin Post*, 29 November 1983.

berada di luar universum permasalahan disiplin bersangkutan, masih dapat ditampung dalam suatu analisa yang memakai pendekatan sosial-budaya. Tetapi ini tidak berarti bahwa sosial-budaya adalah suatu "keranjang sampah." Ini hanya berarti bahwa pendekatan ini merupakan suatu peralatan yang sangat berguna, justru karena dia memusatkan perhatian pada hubungan antara *man in society* dan *society in man* dalam menjelaskan tiap persoalan.³⁹

Yang belum banyak dilakukan adalah menjelaskan hubungan antara perspektif ini dengan disiplin ilmu-ilmu sosial yang konvensional (sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan seterusnya), khususnya kalau keduanya kebetulan menyoroti aspek persoalan yang sama. Dalam khazanah pemakaian istilah-istilah ilmu-ilmu sosial Indonesia, ini berarti memberi batas yang lebih tegas antara peran, tugas dan pendekatan seorang *ahli kebudayaan* dan seorang *budayawan*.

Kekaburan pengertian "sosial-budaya" ini pun dalam konteks ilmu-ilmu sosial Indonesia merupakan suatu yang cukup janggal, kalau kita bisa menerima anggapan dan pengamatan yang pernah dikemukakan bahwa ilmu-ilmu sosial Indonesia sangat kuat dipengaruhi oleh pendekatan kebudayaan yang bertolak dari orientasi nilai/orientasi sosial budaya, dan sedikit sekali memakai pendekatan struktural, yang melihat tingkah laku manusia dalam suatu struktur sosial tertentu.⁴⁰

Dari penelitian ini sekurang-kurangnya menjadi jelas bahwa sistem nilai dan orientasi sosial budaya masih tetap sangat menarik sebagai objek penelitian, pokok analisa dalam kalangan ilmuwan sosial Indonesia.

39 Peter L. Berger, *op.cit.*, hal. 91-92.

40 Lihat wawancara dengan Arief Budiman dalam *Prisma*, Juni 1983.

Jelas pula bahwa penelitian-penelitian tentang nilai-nilai yang merupakan perangkat lunak (*soft ware*) dilakukan dengan menggunakan peralatan *hard social science*, yaitu metode-metode yang merupakan penerapan statistik.⁴¹ Ini menyebabkan munculnya kecenderungan untuk mengukur segala sesuatu—termasuk nilai-nilai—seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Apakah ini mencerminkan keadaan umum ilmu-ilmu sosial Indonesia, hal itu belum dapat dikatakan begitu saja, dan masih harus dilihat dalam suatu penelitian khusus. Namun yang pasti bisa dikatakan tentang perkembangan ilmu-ilmu sosial masa sekarang di Indonesia, ialah bahwa kapasitasnya untuk menjelaskan masyarakat dan gejala, struktur serta perubahan sosial, akan semakin meningkat apabila dia mampu membebaskan diri dari jebakan positivisme empiris, dan matematisasi ilmu sosial dalam menjelaskan tingkah laku manusia, seperti dahulupun (sesudah 1920-an) dia telah berusaha dengan berhasil membebaskan dirinya dari cengkeraman dan pelukan spekulasi filsafat.

Pertanyaan yang menyusul sudah jelas: harus ke mana ilmu-ilmu sosial berkiblat? Mungkin hanya pada dilema dan tuntutan keras serta ambisi Malinowski: *Ein Fach ist kein Fach, eine Wissenschaft keine Wissenschaft*.⁴² Dan penelitian ini yang dari semula menonjolkan sifat interdisiplinernya, patutlah dilihat sebagai usaha yang serius untuk menjawab tantangan dan dilema semacam itu.

41 Soedjatmoko, *Etik Dalam Perumusan Strategi Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Seminar HIPIS, Medan, 1977, hal. 12 ff. Lihat juga Stuart A. Schlegel, *ibid.*

42 Dalam pengantar yang ditulis oleh Paul Reiwald untuk buku Bronislaw Malinowski, *Eine wissenschaftliche Theorie der Kultur*, (Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1975), hal. 7.

Setelah lama ditunggu kini terbit kembali !

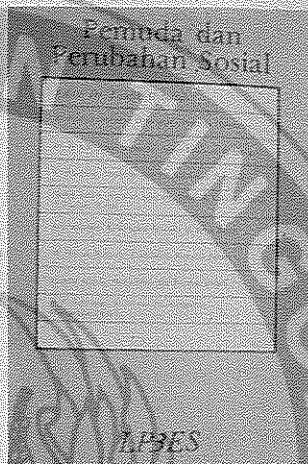
Pemuda dan Perubahan Sosial

editor *Taufik Abdullah*

Apa dan bagaimana hubungan generasi muda dan perubahan sosial di Indonesia? Pemuda menciptakan perubahan atau diciptakan perubahan?

Orang membicarakan hubungan antar generasi tapi juga konflik generasi. Bagaimana soalnya?

Sembilan cendekia Indonesia membahas permasalahan umum generasi muda, kelompok terpilih "elite" dan penyebaran pemuda di desa dan kota. 155 hal. Rp. 1.750,-

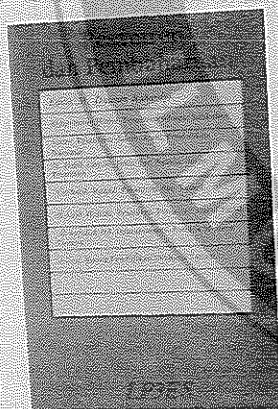


Pesantren dan Pembaharuan

editor *M. Dawan Rahardjo*

Bagaimana sebenarnya wajah pesantren itu? Konon, pesantren mewarnai kehidupan masyarakat sekitar yang terus berubah, tapi bagai tak tersentuh pembaharuan. Benarkah?

Delapan cendekiawan Islam, antara lain Nur-cholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Habib Chirzin — mengupas berbagai aspek lembaga pendidikan tradisional Islam ini di tengah arus modernisasi. 200 hal. Rp. 1.750,-



Dapatkan di toko buku Anda. Pesanan langsung disertai pembayaran tambah ongkos kirim 10% (min. Rp. 750,-) ke :

LP3ES

Jl. S. Parman 81, Slipi
Jakarta Barat. Telp. 597211